

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Festival Berbasis Masyarakat

Festival berbasis masyarakat tersusun dari 3 kata dasar yaitu festival, basis/berbasis, kemudian masyarakat. Dimana ketiga kata tersebut memiliki makna pengertian yang berbeda. Festival menurut Noor (2009), merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia baik secara individu atau kelompok yang berhubungan secara adat, budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Sedangkan pengertian “berbasis” menurut KBBI memiliki makna berpedoman, berasaskan, atau berdasarkan pada suatu hal. Sedangkan pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup dan berkerjasama dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Dari pengertian ketiga makna tersebut disimpulkan bahwa festival berbasis masyarakat sebagai suatu festival yang mengangkat nilai adat, tradisi dan budaya yang mengacu pada pelibatan masyarakat pada penyelenggaraannya.

Pengertian lain mengenai festival berbasis masyarakat menurut Kusen Alipahadi, Yayasan Umar Kayam bahwa festival ini sebenarnya hanyalah salah satu alat dalam kerja kebudayaan. Festival yang digagas ini seperti dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri akan lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam gerakan kebudayaan & Pariwisata. (Heru Prasetya, 2020)

Menurut Beverly J. Stoeltje, dari pandangan berbagai ilmu sosial bisa disimpulkan bahwa umumnya festival itu adalah sesuatu yang berulang secara periodik, merupakan peristiwa sosial yang lewat bentuk-bentuk yang umumnya terdiri dari rentetan peristiwa yang dikoordinasikan, melibatkan secara langsung atau tidak langsung dan untuk maksud yang beragam, seluruh anggota dari keseluruhan komunitasnya, disatukan oleh etnisitas, bahasa, agama, ikatan kesejarahan, dan saling tukar pandangan di antara mereka.

Dalam buku “Berkunjung Ke Rumah Sendiri” Marojahan Adrian Manalu mengemukakan tujuan festival berbasis masyarakat yaitu sebagai laboratorium untuk belajar, eksplorasi gagasan, berbagi dan bermamfaat bagi alam, kearifan lokal, dan masyarakatnya.

Dapat disimpulkan bahwa festival berbasis masyarakat merupakan kegiatan pariwisata yang dilaksanakan pada waktu tertentu di suatu dengan mengangkat nilai sosial, seni, budaya, kearifan lokal yang dimiliki dengan melibatkan masyarakat pada proses penyelenggaraan dengan upaya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat.

Festival sendiri memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dari kegiatan atau acara pariwisata lainnya. Menurut Pudjiastuti (2010) karakteristik umum festival yaitu sebagai berikut:

- a. Melibatkan banyak masyarakat dalam penyelenggaraan festival

- b. Tujuan utamanya yaitu memberikan hiburan kepada masyarakat umum dan bagi peserta/pengunjung untuk menunjukkan eksistensinya.
- c. Terdapat berbagai aneka hiburan, pertunjukan, seni, budaya atau permainan bisa dikemas dalam suatu acara yang berbentuk fair atau festival.
- d. Mengangkat satu tema dari isu dari kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.
- e. Fair dan festival seringkali diadakan bersama agar saling mendukung.
- f. Masyarakat umum merupakan sasaran utama
- g. Untuk venue penyelenggaraan festival dapat dimana saja, namun harus representatif, untuk jenis fair dan festivalnya.
- h. Waktu penyelenggaraan biasanya rutin dalam setahun bis berlangsung 1 sampai 3 hari Pelaksanaannya bisa 1 atau 3 hari bahkan ada yang lebih dari seminggu.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995). Dimana pemberdayaan masyarakat merupakan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang berjalan terus menerus dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang lembaga/instansi/komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Hogan (dalam Adi, 2013: 212) mengemukakan bahwa melihat proses pemberdayaan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja.

Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif – alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan (Harry Hikmat, 2010). Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif, perlu adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Karena itu perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal (Craig dan Mayo, 1995 dalam Harry Hikmat, 2010:3).

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut (Sulistiyani & Wulandari, 2017) Ambar Teguh Sulistiyani, (2004: 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat diantaranya dirangkum menjadi 2 tujuan utama yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan suasana, kondisi atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan keberdayaan dan kepariwisataan secara berkelanjutan.

2. Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri yang meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut:

1. *Learning by doing* yang artinya pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus-menerus, dan dampaknya dapat terlihat

2. *Problem solving* yang artinya, pemberdayaan harus dapat memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.

3. *Self evaluation* yang artinya, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.

4. *Self development and coordination*: artinya, mendorong masyarakat agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara luas

5. *Self selection* yang artinya, suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah kedepan.

6. *Self decision* yang artinya, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (Saraswati, dalam Alfitri, 2011:23-24).

2.2.3 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang berfokus pada proses bukan hasil juga bukan sebuah proses instan. Tetapi pemberdayaan adalah suatu proses yang kontinue untuk mencapai suatu perubahan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat yang semula memiliki posisi terbelakang dan tidak berdaya menjadi lebih berdaya dan mandiri. Menurut Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowjoto (2007:101) proses pemberdayaan secara sederhana dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. **Tahap Penyadaran**, memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi mereka agar keluar dari kemiskinan, biasanya tahap ini dilakukan dengan pendampingan.

2. **Tahap pengkapasitasan**, memungkinkan masyarakat kurang mampu agar memiliki keterampilan untuk mengambil peluang yang diberikan dengan melakukan pelatihan-pelatihan, dan kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan lifeskill.

3. **Tahap Pendayaan**, tahap dimana masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

Pemberdayaan merupakan proses yang membutuhkan waktu dan tindakan nyata secara bertahap dan terus menerus meningkatkan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan memerlukan kegiatan pendampingan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan/program pemberdayaan masyarakat keberadaan tim pembimbing/agen/aparat pemberdayaan merupakan alat yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat tujuan akhir dari suatu program atau kegiatan pemberdayaan.

2.3 Desa Wisata Sebagai Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Nuryanti (1992) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan sistematis dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Hadi Wijaya mendefinisikan desa wisata sebagai kawasan yang menawarkan suasana keseluruhan yang mencerminkan keindahan pedesaan baik kehidupan sosial ekonomi adat istiadat kehidupan sehari-hari dengan arsitektur bangunan khas dan tata ruang desa atau ekonomi yang unik dan menarik memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai komponen pariwisata seperti atraksi akomodasi makanan dan minuman dan kebutuhan wisata lainnya (Wahyuni, 2018). Menurut Peace pengembangan desa wisata merupakan suatu proses yang menekankan metode untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Pembangunan masyarakat adalah model pembangunan yang memaksimalkan peluang bagi masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) kegiatan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat. Gagasan kegiatan pariwisata dan pengelolannya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, dalam CBT, peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan elemen terpenting dalam pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan bentuk implementasi pengembangan pariwisata masyarakat dan berkelanjutan. Apalagi keberadaan desa wisata menjadikan produk

lebih bernilai budaya bagi pedesaan, sehingga pengembangan desa wisata memiliki nilai budaya tanpa merusak.

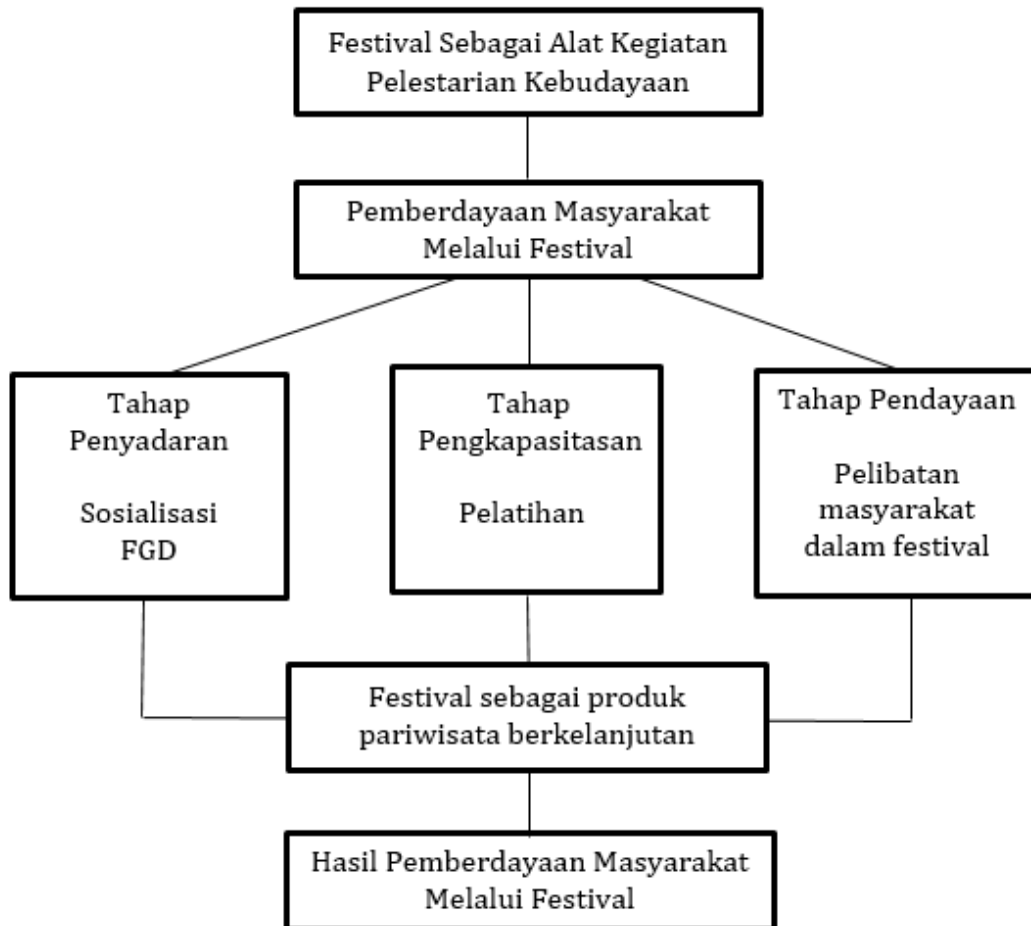
Soemarno (2010:2-4) mengemukakan bahwa untuk suksesnya pengembangan desa wisata perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya serta di bidang - bidang kepariwisataan.
- b. Kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata dikota atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang dikerjakasamakan antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.
- c. Kegiatan pemerintahan di desa. Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.
- d. Promosi Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media.
- e. Festival/pertandingan. Secara rutin diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa tersebut, misalnya mengadakan pertandingan, festival, dan lain-lain.
- f. Membina organisasi masyarakat. Penduduk desa yang biasanya merantau kemudian mudik atau tradisi lain dapat dibina dan diorganisir untuk memajukan desa wisata mereka.
- g. Kerjasama dengan universitas. Kerjasama sebaiknya dilakukan dengan universitas atau perguruan tinggi yang melakukan pengembangan dan pengabdian supaya dilaksanakan di desa wisata. Hal ini guna membuka peluang dan masukan bagi kegiatan di desa wisata.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Purnomo, dkk (1998), kerangka pemikiran menjelaskan gejala yang menjadi objek pembahasan dan penyusunan pertanyaan berdasarkan tinjauan pustaka dan temuan penelitian terkait. Kerangka berpikir adalah argumen peneliti ketika merumuskan hipotesis. Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, berikut digambarkan kerangka berpikir penelitian “Festival Berbasis Masyarakat lokal Sebagai Pemberdayaan Sumber Daya manusia di Desa Wisata Meat” dalam bentuk bagan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

Desa Meat adalah desa wisata yang memiliki berbagai potensi wisata baik potensi wisata alam, budaya, dan event festival. Potensi yang dimiliki oleh desa Meat ini tidak diikuti dengan keterampilan sumber daya manusianya untuk mengelola potensi tersebut sehingga perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat. Adapun tahap pemberdayaan yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu, tahap penysadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Proses pemberdayaan yang dilakukan sebagai sebuah proses untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan sebuah hasil dari proses pemberdayaan melalui festival berbasis masyarakat.